



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Sumenep

Dewi Ayu Puspitasari ¹, Anggraeny Puspanyngtyas ²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dwayupsptsr@gmail.com anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

Abstract. *As the time passes and the population increases, the environment will change. One of the causes of the change is the problem of garbage. Waste is a serious problem that needs to be addressed immediately as it affects human lives, directly or indirectly. Sumenep district as one of the regions in Indonesia is growing rapidly, facing an ever-increasing problem of garbage. The study aims to analyze the implementation of household garbage management policy in Sumenep district by identifying supportive and inhibitory factors encountered in the process of implementation in accordance with the policies set out in the Regional Regulations No.83 Year 2018. The method used in this research is a qualitative approach to data collection through interviews and observations. The results of this study use the George Edward III implementation model that covers Communication, Resource, Commitment and Bureaucratic Structure. This research shows that the waste management policy in Sumenep City is not optimal, the resources are not optimal when compared to the amount of garbage that comes in daily, the lack of government commitment, and the socialization of the trash management is not even throughout the Sumenep region.*

Keywords: *Policy Implementation, Local Regulations, Waste Management.*

Abstrak. Seiring berjalannya waktu dengan diikuti bertambahnya jumlah penduduk maka akan diikuti pula dengan perubahan lingkungan. Salah satu penyebab perubahan tersebut yaitu adanya masalah sampah. Sampah merupakan masalah serius yang harus segera diatasi karena mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Kabupaten Sumenep sebagai salah satu wilayah yang ada di Indonesia berkembang pesat, menghadapi permasalahan sampah yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Sumenep dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses implementasi sesuai kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah No.83 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menggunakan model implementasi George Edward III yang meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Komitmen serta Struktur Birokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sumenep belum optimal, Sumber daya yang belum optimal jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang masuk setiap hari, kurangnya komitmen pemerintah, serta sosialisasi pengelolaan sampah yang belum merata diseluruh daerah Sumenep.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah

LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu dengan diikuti bertambahnya penduduk yang semakin banyak maka akan diikuti pula dengan perubahan lingkungan. Salah satu penyebab perubahan tersebut yaitu adanya masalah sampah. Sampah merupakan masalah serius yang harus segera diatasi oleh pemerintah maupun masyarakat. Tentunya cara mengatasi sampah yaitu melalui pengelolaan sampah itu sendiri. Karena jika sampah yang dihasilkan langsung dibuang, ditimbun, maupun dibakar di suatu tempat akan mengurangi keindahan, kenyamanan, dan beresiko merusak serta mencemari lingkungan.

Sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat maupun proses produksi domestik dan proses industri. Sampah menurut Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu sisa kegiatan manusia atau proses alam yang berbentuk

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Accepted Oktober 25, 2023

* Dewi Ayu Puspitasari, dwayupsptsr@gmail.com

padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat terurai atau tidak dapat terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sumber sampah dapat berasal dari tempat umum ataupun pemukiman penduduk.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan merupakan suatu tempat di mana makhluk hidup tinggal, berkembang dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terikat secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang lain. Lingkungan memiliki pengaruh terhadap sifat, perilaku, dan karakter manusia yang mempunyai sifat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap benda dan makhluk hidup lainnya

Indonesia sebagai Negara Hukum tentunya memiliki peraturan untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Untuk mengatur masalah tentang sampah di lingkungan masyarakat, Pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada setiap pemerintah daerah dalam memberikan kewenangan berupa otonomi daerah, yaitu mengatur dan mengurus daerahnya sendiri salah satunya dengan membuat suatu kebijakan. Anderson (1979) mendefinisikan Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang terletak diujung timur Pulau Madura, Jawa timur. Menurut data sensus penduduk tahun 2022, Kabupaten Sumenep memiliki luas wilayah 2.093 km dengan jumlah penduduk mencapai 1.135.903 jiwa. Tingginya penduduk Kabupaten Sumenep berpengaruh terhadap tingginya jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Sampah yang dihasilkan Kabupaten Sumenep setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Menurut data sampah di Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Sumenep pada Tahun 2019 menghasilkan 22ton perhari, tahun 2020 yaitu 26 Ton perhari, tahun 2021 yaitu 27 ton perhari, tahun 2022 yaitu 32 ton perhari serta tahun 2023 yaitu 29 tahun perhari. Dari data tersebut, tentunya sampah yang terus-menerus dihasilkan oleh masyarakat Sumenep tidak mungkin langsung dibuang dan ditimbun di TPA. Karena jika sampah yang dihasilkan langsung ditimbun maka akan terjadi penumpukan, mengurangi keindahan, kenyamanan, serta berisiko merusak dan mencemari lingkungan,. Oleh karena itu, sampah yang dihasilkan harus dikelola, dipilah, dan didaur ulang untuk menghasilkan sumber daya atau barang yang dapat dipergunakan lagi.

Adanya penambahan karakteristik, jumlah, serta jenis sampah yang semakin beragam menimbulkan suatu masalah. Masalah tersebut membutuhkan penanganan dan perhatian

pemerintah secara khusus, karena jika tidak segera ditangani dan dikelola dengan baik, akan semakin berdampak pada kesehatan masyarakat, kenyamanan, kelestarian dan pencemaran lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Sumenep mengeluarkan Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strateg Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Sumenep. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang berkelanjutan (Peraturan Bupati (PERBUP), 2018).

Pemerintah Sumenep melakukan beberapa upaya dan strategi untuk terus mengatasi masalah sampah. Beberapa upaya tersebut seperti pengadaan Tempat Pembuangan Sampah di beberapa tempat, pengadaan Tempat Pembuangan Akhir atau TPA, program pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (biasa dikenal dengan 5R), pengadaan truck pengangkut sampah dan pembentukan sektor atau komunitas yang menangani masalah sampah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti Luas Tempat Pembuangan Akhir atau TPA yang dimiliki oleh Pemerintah Sumenep berukuran 8 hektar saja dan masih belum cukup untuk menampung sampah yang masuk setiap harinya, penyediaan TPS yang di beberapa tempat yang masih belum maksimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat Sumenep yang masih membuang sampah ketepi sungai (Mahdi & Iswanto, 2023).

Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat beberapa faktor dan hambatan samping yang saling bertemu sehingga menyebabkan masalah sampah belum bisa teratasi. Untuk mengatasi masalah tentang pengelolaan sampah, diperlukan penelitian lebih dalam menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori George Edward untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung yang meliputi indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam penelitian ini.. Penelitian ini akan berfokus pada analisis kebijakan dalam penanganan masalah pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Sumenep sehingga mendapatkan kebijakan dan strategi yang tepat.

KAJIAN TEORITIS

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (Edwards, 1980:1), Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik Implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya

persiapan dan perencanaan Implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang Menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai Tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada Empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Edwards, 1980:1) keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

2. Indikator Implementasi Kebijakan

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel

3. Definisi Sampah

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa suatu benda yang telah diolah,, baik karena telah sudah diambil bagian yang penting telah dihilangkan, atau karena, tidak ada manfaatnya baik ditinjau dari

segi sosial, ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan hidup (Subekti, 2010).

4. Jenis Sampah

Jenis sampah berdasarkan sifatnya di bedakan menjadi 3 macam, yaitu (Malina, Suhasman, Muchtar, & Sulfahri, 2017):

a. Sampah Organik,

Sampah Organik merupakan suatu barang yang dibuang oleh pemilik sebelumnya dan tidak dimanfaatkan lagi. Namun, sampah juga dapat dimanfaatkan, ditangani, dan diolah kembali sebagai barang yang berguna dengan tata cara yang benar. Sampah ini dapat dengan mudah diuraikan melalui proses alami. Sampah organik merupakan sampah yang cepat terurai, seperti sampah hewan, sampah sayur-sayuran, sampah hijau, sampah pekarangan dan lain-lain.

b. Sampah Non-organik

Sampah non-organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non- hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan sumber daya mineral. Sampah ini merupakan sampah yang tidak mudah menbusuk seperti, kertas, plastik, logam, karet, kaca, bahan bangunan bekas dan lainnya.

c. Sampah B3 (Bahan berbahaya beracun)

Pada sampah berbahaya atau bahan beracun (B3), sampah ini terjadi dari zat kimia organik dan nonorganik serta logam-logam berat, yang umumnya berasal dari buangan industri. Pengelolaan sampah B3 tidak dapat dicampurkan dengan sampah organik dan nonorganik. Biasanya ada badan khusus yang dibentuk untuk mengelola sampah B3 sesuai peraturan yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menjelaskan fenomena- fenomena yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sumenep secara mendalam melalui observasi dan wawancara lalu melihatnya dengan teori George Edward III, meliputi komunikasi, sumberday, disposisi dan struktur birokrasi. .Pemilihan metode kualitatif diharapkan dapat menghasilkan suatu penjelasan secara mendalam mengenai perilaku atau tingkah laku yang dapat dialami dari suatu individu, masyarakat, organisasi atau kelompok tertentu dengan mengkaji sudut pandang secara komprehensif dan utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data terakhir sampah yang masuk kedalam tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Torbang, Kecamatan Batuan 29 ton/ hari dengan 870 ton/ bulan. Tempat Pembuangan Akhir yang berada di Desa Torbang Kecamatan Batuan merupakan satu-satunya TPA yang dimiliki oleh kabupaten Sumenep. Dengan banyaknya sampah yang dihasilkan setiap harinya, pemerintah Kabupaten Sumenep harus melakukan beberapa upaya untuk menangani masalah tersebut. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumenep membuat suatu kebijakan Peraturan Daerah No. 83 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Suemenp yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang berkelanjutan.

Pengurangan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Sumenep termasuk daur ulang sampah, pembatasan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah secara merata. Metode TPA yang digunakan dengan melakukan penimbunan atau open dumping dan landfill mengakibatkan tidak terkendalinya produksi sampah di Sumenep. Satu-satunya Tempat Pembuangan Akhir yang dimiliki sumenep terjadi penimbunan dan kekurangan lahan, karena luas lahan yang dimiliki hanya 8 hektar saja. Oleh karena itu, Kabupaten Sumenep melakukan beberapa strategi pengelolaan sampah melalui pengadaan Truk pengangkut sampah, Tempat Pembuangan Sementara, Bank Sampah, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, Penggerak Komunitas Bank Sampah Syariah Indonesia (KBSSSI) serta membangun Pusat Daur Ulang Sampah di TPA. Proses pemilahan serta pengelolaan sampah menjadi barang berguna sudah dilaksanakan tetapi masih belum optimal, hal ini diakibatkan karena pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya merata ke seluruh Kecamatan yang ada di Sumenep. Hal ini seharusnya menjadi agenda pemerintah untuk mendistribusikan sarana dan prasarana yang mendukung proses pengelolaan sampah disetiap daerah, agar sampah yang dihasilkan tidak langsung dibuang, ditimbun dan dibakar disuatu tempat. Tetapi melakukan proses pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali sampah yang ada

Keadaan yang dihadapi selama Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah selain minimnya sarana dan prasarana adalah minimnya pola pikir masyarakat yang masih belum sepenuhnya melakukan pola hidup bersih, sehat, serta belum paham pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dari sampah yang dihasilkan. Pelaksanaan implementasi pengelolaan

sampah akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan implementasi pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sumenep, masyarakat sebagai kelompok sasaran belum sepenuhnya menyadari akan perannya dalam keberhasilan implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep.

Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari pelaksanaan pengelolaan sampah itu sendiri, dengan menggunakan Teori George Edward III yang memiliki empat faktor dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan pengelolaan sampah:

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep akan berhasil apabila dikomunikasikan dengan baik. Pelaksanaan Komunikasi dalam Kebijakan ini masih belum optimal. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep belum melakukan sosialisasi secara insentif dan merata kepada seluruh Desa yang berada di Kabupaten Sumenep terkait Kebijakan ini, khususnya desa yang jauh dari Pusat Kota. Komunikasi yang belum efektif ini mengakibatkan masyarakat belum terdorong untuk melakukan proses pengelolaan sampah yang benar, sehingga sampah rumah tangga yang dihasilkan di beberapa Desa hanya dibiarkan dibuang di tepi sungai tanpa melakukan proses 5R, khususnya di desa pesisir.

b. Sumber daya dalam kebijakan ini harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Financial. Implementasi Kebijakan ini dalam indikator sumber daya belum terlaksana dengan baik. Pemerintah Daerah sudah mengadakan beberapa fasilitas seperti pengadaan truk pengangkut sampah, Tempat Pembuangan Sementara, Bank Sampah maupun Tempat Pembuangan Akhir. Namun hal itu masih belum cukup dikarenakan fasilitas yang ada belum memenuhi kebutuhan sampah yang dihasilkan setiap harinya, terutama tempat TPA yang jauh dari desa-desa yang lain serta fasilitas yang belum merata. Selain itu, pengadaan Sumber daya yang belum merata dibuktikan dengan; *Pertama*, minimnya dana terkait pengelolaan sampah maupun perluasan TPA yang dimiliki karena perluasan lokasi landfill biayanya cukup mahal. TPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini hanya 8 hektar saja dan belum ada tanda tanda perluasan wilayah. Kedua, SDM atau petugas yang masih sedikit atau belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang masuk setiap hari yang mencapai hingga 28ton /hari . SDM yang terbatas ini membuat pengelolaan sampah meliputi pemilahan dan pemanfaatan sampah belum terlaksana secara maksimal dimana kedua hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan.

- c. Disposisi menunjuk karakter implementor kebijakan/program. Sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan ini sudah cukup bagus baik petugas kebersihan maupun kinerja pemerintah daerahnya itu sendiri. Namun, Dinas Lingkungan Hidup harus terus melakukan upaya sosialisasi dan penanganan secara merata tentang pentingnya pengelolaan sampah sehingga dapat membiasakan gaya hidup berkelanjutan.. Selain itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 DLH Kabupaten Sumenep juga mengusahakan terkait pencarian solusi sumber dana untuk perluasan wilayah tempat pembuangan akhir sampah dan penambahan jumlah petugas pengelolaan sampah.
- d. Struktur birokrasi
- Pada aspek ini mencakup mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah terlaksana dengan baik, yaitu dengan adanya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep beserta jajarannya, UPT Pengelolaan Sampah, Komunitas Pengelola Sampah serta petugas-petugas pengangkutan sampah dari TPS ke TPA meskipun bisa dibilang masih sedikit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi (Edwards, 1980:1), Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik Implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan Implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang Menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sumenep Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikeluarkan pada 30 Oktober 2018 belum optimal karena masih ada beberapa faktor pendorong dan penghambat seperti Pertama, Komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan ke sasaran kebijakan belum efektif karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham pentingnya pengelolaan sampah. Kedua, Sumber Daya baik petugas yang masih sedikit dan pengadaan sarana dan prasarana yang belum merata ke seluruh desa yang ada di Sumenep.. Ketiga, Disposisi atau Sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan ini sudah dilakukan namun belum terlaksana secara baik. Keempat Struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik seperti adanya Dinas Lingkungan Hidup , petugas kebersihan, komunitas pengelolaan sampah beserta jajaran lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Publik Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Press.
- Mahdi, I., & Iswanto, T. (2023). Hanya Kreatif Menumpuk Sampah. Retrieved from Kabar Madura website: <https://kabarmadura.id/hanya-kreatif-menumpuk-sampah/>
- Malina, A. C., Suhasman, S., Muchtar, A., & Sulfahri, S. (2017). Kajian Lingkungan Tempat Pemilahan Sampah di Kota Makassar. *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar*, 1(1), 14–27.
- Peraturan Bupati (PERBUP). (2018). *Peraturan Bupati Sumenep Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sumenep Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subekti, S. (2010). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat. *Prosiding Seminar Sains Nasional Dan Teknologi*, 1(1), 24–30.